

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dapat menjadi negara yang rentan terhadap infiltrasi pemahaman-pemahaman radikal atau radikalisme jika pemerintah dan masyarakatnya sendiri tidak mampu bersikap preventif dan siaga terhadap hal-hal yang membahayakan tersebut. Pengertian dari radikalisme sendiri menurut kamus Cambridge adalah “*The belief that there should be great or extreme social or political change*”.<sup>1</sup> Jika pengertian tersebut dihubungkan dengan hal yang terjadi di Indonesia, berarti radikalisme merupakan sebuah pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila dikarenakan adanya ketidaksetujuan dan keinginan untuk mengganti sistem politik atau dasar negara Indonesia. Keberadaan dari radikalisme di Indonesia bisa ditunjukkan dari berbagai macam bentuk, dimulai dari ujaran kebencian melalui sosial media hingga yang paling parah, yaitu terorisme seperti yang terjadi di Bali pada tahun 2002 lalu. Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD mengemukakan bahwa terdapat tiga tindakan radikalisme, yaitu ujaran kebencian, jihad teroris, dan memengaruhi remaja dengan paham radikal.<sup>2</sup> Pada era Jokowi, radikalisme masih

---

<sup>1</sup>Cambridge Dictionary, s.v. “*radicalism*,” Diakses pada 20 Februari 2020. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/radicalism>

<sup>2</sup>Reza Efendi, “Mahfud MD Sebut Ada 3 Wujud Radikalisme Di Indonesia.” *Liputan6*, 27 November, <https://www.liputan6.com/regional/read/4119789/mahfud-md-sebut-ada-3-wujud-radikalisme-di-indonesia>.

menjadi isu yang masih perlu diberantas mengingat radikalisme menjadi sesuatu yang mengancam kestabilan dan kesatuan negara Indonesia.

Walaupun begitu, Indonesia terlihat masih belum mampu mengatasi permasalahan radikalisme ini. Bentuk radikalisme seperti terorisme sudah banyak terjadi di Indonesia, seperti bom bunuh diri yang terjadi di Jakarta pada 14 Januari 2016. Namun, langkah pemerintah seperti kerja sama antara BNPT dengan instansi kementerian agama dan instansi pemerintah lainnya belum terlaksana dengan baik.<sup>3</sup> Terdapat survei yang dilakukan pada Oktober 2017 oleh Alvara *Research Center* yang menunjukkan tingkat radikalisme di Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi.



**Gambar 1.1 Hasil Survei Terhadap Radikalisme di Tahun 2017**  
Sumber: Alvara *Research Center* dan Mata Air Foundation, 2017, <https://pinterpolitik.com/radikalisme-hantu-milik-siapa>.

<sup>3</sup> V. Arianti, and Muh Taufiqurrohman, "Indonesia" *Counter Terrorist Trends and Analyses* 9, no. 1 (2017): 13-17, Diakses 23 Februari 2020, [www.jstor.org/stable/26351476](http://www.jstor.org/stable/26351476).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Alvara Research Center* dan *Mata Air Foundation*, dapat kita lihat bahwa radikalisme telah menginfiltrasi berbagai macam kalangan dan usia, dimulai dari pelajar hingga para pegawai yang seharusnya telah mengerti bahwa radikalisme merupakan sebuah pemahaman yang seharusnya tidak dijadikan pedoman dalam keberlangsungan hidup. Diharuskan menjadi suatu hal yang diprihatinkan juga karena berdasarkan data di atas, justru pelajar dan mahasiswa menjadi bagian yang cukup besar dari masyarakat yang terpapar paham radikal. Hal tersebut menunjukkan bahwa institusi pendidikan di Indonesia belum mampu menjadi sarana yang baik dalam pencegahan paham radikal agar tidak terpapar bagi masyarakat di Indonesia, khususnya para remaja. Memang jika dilihat dari data yang dilampirkan di atas, tingkat dari radikalisme belum dapat dianggap sangat tinggi ataupun memprihatinkan, namun angka tersebut akan terus meningkat jika tidak ada langkah yang diambil oleh pemerintah. Selain data yang dikeluarkan oleh *Alvara Research Center*, direktur dari *Wahid Foundation* yaitu Yenni Wahid juga mengeluarkan data yang cukup memprihatinkan, yaitu:

...Dalam survei tahun 2017, terdapat 7,8 persen responden yang bersedia menjadi radikal. Bila diproyeksikan kepada jumlah penduduk Indonesia, maka terdapat sekitar 11 juta penduduk Indonesia yang bersedia melakukan tindakan radikalisme.<sup>4</sup>

Hasil survei yang dilakukan oleh *Wahid Foundation* menunjukkan bahwa diperlukan adanya langkah-langkah pasti agar pemahaman radikal tidak terus

---

<sup>4</sup> Wahid Foundation, "Yenni Wahid: Intoleransi Dan Radikalisme Masih Jadi PR Pemerintahan Mendatang." *Wahid Foundation: Seeding Peaceful Islam*, Mei 2019, <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Yenni-Wahid-Intoleransi-dan-Radikalisme-Masih-Jadi-PR-Pemerintahan-Mendatang>.

menerus menyebar dan merusak kestabilan negara Indonesia. Sebagai bentuk kerja sama, ASEAN dapat menjadi sumber pertolongan dalam memberantas radikalisme yang ada di Indonesia, oleh karena itu angka yang telah dilampirkan di atas seharusnya mampu menjadi pendorong antara kedua pihak, yaitu Indonesia dan ASEAN mengingat Indonesia sebagai bagian dari organisasi regional tersebut. Selama perjalanannya, ASEAN dan Indonesia memang telah memiliki hubungan yang baik dalam konteks pemberantasan radikalisme di Asia Tenggara. Namun, hubungan baik tersebut harus disetarakan dengan kerja sama yang efektif juga. Jika tidak diberikan penanganan dengan baik, hal itu dapat menodai hubungan kerja sama Indonesia dengan ASEAN, serta kestabilan ASEAN itu sendiri.

Melihat data yang telah diberikan di atas, perlu diketahui pula bahwa Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengalami radikalisme. *Association of Southeast Asian Nations* atau ASEAN juga menganggap bahwa radikalisme menjadi isu yang sangat serius untuk dibahas dan tidak dibiarkan untuk terus ada demi perdamaian dunia, khususnya di dalam lingkup negara-negara ASEAN. Pada 6 September 2016, ASEAN mengadakan pertemuan di Laos di mana salah satu poin pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai permasalahan terorisme dan radikalisme.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan kepedulian ASEAN terhadap negara anggota dan rakyat yang tinggal di dalamnya agar terhindar dari bahaya radikalisme. Fokus ASEAN terhadap isu ini sangat tinggi, kerja sama yang dilakukan ASEAN pun bukan hanya antar negara-negara anggota di dalamnya

---

<sup>5</sup> Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, "Seven Issues Raised in ASEAN Foreign Ministers Meeting in Laos." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 6 September 2016, <https://setkab.go.id/en/seven-issues-raised-in-asean-foreign-ministers-meeting-in-laos/>.

tetapi juga dengan negara lain, seperti Australia. Presiden Jokowi bekerja sama dengan ASEAN dan juga *Prime Minister* dari Australia, Malcolm Turnbull untuk bersama-sama melawan gerakan radikalisme, khususnya terorisme. Kerja sama tersebut menghasilkan *Joint Declaration* yang berisi mengenai perlawanan terhadap terorisme, dan rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan kerja sama dalam melawan terorisme<sup>6</sup>.

Dari hal tersebut maka setiap orang dapat melihat bahwa ASEAN juga mengalami kekhawatiran yang sama mengenai radikalisme dimana hal ini selalu menghantui kestabilan ASEAN sebagai organisasi yang juga terbentuk atas dasar keinginan untuk memperkuat keamanan wilayah Asia Tenggara serta negara-negara yang bergabung di dalamnya. Melihat kesamaan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia, maka Indonesia serta ASEAN perlu untuk menanggapi bersama-sama isu ini dikarenakan radikalisme yang semakin parah akan membawa kepada sesuatu yang lebih parah, yaitu terorisme. Indonesia telah mengalami banyak kejadian terorisme, begitu pula dengan wilayah Asia Tenggara yang juga seringkali menjadi target serangan terorisme. Adapun salah satu kejadian di wilayah Asia Tenggara yang memicu ASEAN untuk terus berfokus kepada masalah ini adalah perang yang terjadi di kota Marawi, Filipina Selatan. Pada sekitar bulan Mei 2017, terjadi serangan yang dilakukan oleh dua kelompok teroris yaitu kelompok Abu Sayyaf dan Maute. Kedua kelompok ini berusaha untuk merebut wilayah

---

<sup>6</sup> Tama Salim, "ASEAN to Focus on Radicalism." *The Jakarta Post*, 8 September 2016, <https://www.thejakartapost.com/seasia/2016/09/08/asean-to-focus-on-radicalism.html>.

Marawi dan melakukan hal yang keji yaitu membunuh orang-orang yang hidup di sana dan beragama non-muslim.<sup>7</sup>

Selain serangan bom Bali yang pernah terjadi di Indonesia, terdapat satu insiden terorisme yang juga banyak orang telah ketahui yaitu kelompok teror di Poso yang bernama Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Kelompok ini merupakan bagian kecil dari Jemaah Islamiyah yang juga kelompok teroris dan dipimpin oleh Santoso sejak sekitar tahun 2000 hingga pada 2016 lalu yang dimana Santoso meninggal ditembak dikarenakan adanya pemburuan yang dilakukan oleh polisi serta TNI.<sup>8</sup> Pada saat kematian Santoso, Al Chaidar sebagai pengamat teroris di Indonesia berpendapat bahwa pengikut MIT akan bergabung bersama kelompok Marawi yang berada di Filipina karena sekiranya memiliki strategi terorisme yang sama.<sup>9</sup> Berdasarkan kejadian ini maka dapat dilihat koneksi dan urgensi yang dimiliki antara Indonesia dengan ASEAN untuk menjaga wilayah Asia Tenggara. Dibutuhkan kerja sama antara Indonesia dan ASEAN dengan berunding serta adanya implementasi untuk mencegah kejadian-kejadian seperti yang telah disebutkan agar tidak terjadi lagi. Masih ada kemungkinan terjadinya terorisme di Indonesia dan ASEAN, hal tersebut patut untuk diperhatikan dengan baik

---

<sup>7</sup> Amnesty International, "The Battle of Marawi: Death and Destruction in the Philippines" *Amnesty International*, 22 Januari 2021. <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3574272017ENGLISH.PDF>

<sup>8</sup> Detha Arya Tifada, "The Roots of The Formation of the East Indonesia Mujahidin Terrorist Group (MIT)", 30 November 2020, diakses pada 21 Januari 2021, <https://voi.id/en/memori/21459/the-roots-of-the-formation-of-the-east-indonesia-mujahidin-terrorist-group-mit>

<sup>9</sup> Natashya Gutierrez, "After Death of Indonesia's Top Terrorist, Comrades 'May Join Abu Sayyaf'", 21 Juli 2016, Diakses pada 21 Januari 2021, <https://www.rappler.com/world/asia-pacific/santoso-abu-sayyaf-mit>

mengingat betapa buruk dampak yang dapat diberikan kepada kestabilan Indonesia, wilayah Asia Tenggara, serta kestabilan ASEAN itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas dan betapa pentingnya isu ini untuk terus dijadikan fokus oleh pemerintah dan ASEAN selaku organisasi regional Asia Tenggara untuk dicegah dan dihapuskan, maka peneliti akan menuliskan topik yang difokuskan terhadap terorisme dan radikalisme ini dengan judul “Kerja Sama Indonesia dan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) Dalam Melawan Terorisme Berbasis Radikalisme Agama Islam di Indonesia”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk membatasi dan memberikan fokus terhadap topik pembahasan, peneliti telah merumuskan beberapa pertanyaan, seperti dituliskan berikut ini:

1. Bagaimana bentuk terorisme berbasis radikalisme agama di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk kerja sama Indonesia dan ASEAN untuk melawan terorisme berbasis radikalisme agama di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Melalui penelitian ini, tujuan penelitian yang diharapkan adalah menjelaskan bagaimana Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Islam menghadapi terorisme berbasis radikalisme agama serta langkah penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang diberikan. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk memaparkan bentuk kerja sama

antara Indonesia dengan ASEAN untuk memberantas terorisme berbasis radikalisme agama, khususnya di Indonesia.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini pada akhirnya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai eksistensi terorisme berbasis radikalisme agama di Indonesia. Lebih daripada itu, kegunaan dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan penjelasan serta paparan yang dalam mengenai kerja sama antara Indonesia dengan ASEAN dalam menangkal dan memberantas terorisme berbasis radikalisme agama yang ada di Indonesia sebagai salah satu negara anggota di dalamnya.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada Bab I peneliti memberikan gambaran dari keseluruhan isi penelitian ini dengan memaparkan latar belakang dari topik yang diambil, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan dari penelitian yang diharapkan akan tercapai.

Pada Bab II yang berisi tinjauan pustaka serta landasan teori yang berisi teori atau konsep. Tinjauan pustaka akan diisi dengan literatur-literatur yang bersangkutan dengan topik penelitian ini yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya serta penjelasan mengenai teori maupun istilah penting yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Selanjutnya pada landasan teori yang berisi teori atau konsep, peneliti akan memaparkan dasar teori Hubungan Internasional yang dijadikan fondasi dalam keseluruhan penelitian ini.

Pada bab III yang merupakan metodologi penelitian, peneliti akan menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, metode penelitian, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selain itu juga, peneliti akan memaparkan rencana analisis untuk bab selanjutnya yang dilakukan dengan cara membandingkan serta mengulas kembali literatur-literatur penelitian yang bersangkutan dengan topik penelitian ini.

Pada bab IV, merupakan pembahasan di mana peneliti akan memaparkan secara detil data-data yang telah dikumpulkan peneliti mengenai topik radikalisme di Indonesia dan kerja samanya dengan ASEAN. Pembahasan ini akan menjawab rumusan masalah yang ada pada bab I dan menggunakan teori yang akan dijadikan fondasi bagi keseluruhan penjelasan pada penelitian yang telah dipaparkan pada bab II.

Pada bab V, merupakan kesimpulan dan saran di mana peneliti akan memberikan ringkasan dan kesimpulan dari keseluruhan isi dari penelitian ini dimulai dari Bab I hingga Bab IV. Saran-saran juga akan disajikan kepada pemerintah Indonesia sebagai hasil dari penelitian ini mengenai bentuk kerja sama antara Indonesia dengan ASEAN, serta langkah-langkah untuk mengurangi angka radikalisme di Indonesia.